

INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER, KHUSUS PEMBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN MENDUDUKI POSISI TERENDAH DI KALIMANTAN SELATAN

Diana Haiti^a, Fatimah^a

^aUniversitas Lambung Mangkurat

Email korespondensi: diana.haiti@ulm.ac.id

ABSTRAK

Gender mengacu pada karakteristik perempuan, laki-laki, yang dikonstruksi secara sosial. Ini termasuk norma, perilaku dan peran yang terkait dengan menjadi perempuan, laki-laki, serta hubungan satu sama lain. Sebagai konstruksi sosial, gender bervariasi dari masyarakat ke masyarakat dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Dimensi pembedayaan gender di 9 (Sembilan) daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, yakni keterlibatan perempuan di parlemen, partisipasi sebagai tenaga profesional, dan sumbangan dalam pendapatan pekerjaan masih perlu ditingkatkan lagi, terutama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian ini menggunakan teknik validitas data triangulasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara tentang situasi dan latar belakang rendah IDG, bentuk, dan evaluasi program pemberdayaan (pendukung, penghambat, solusi, rencana tindak lanjut), observasi dengan pedoman terhadap suasana pemberdayaan politik. Hasil penelitian ini mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: Indeks pemberdayaan gender, khusus pemberdayaan politik perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menduduki posisi terendah di Kalimantan Selatan karena di daerah pedesaan Kab. HSS suara perempuan kurang didengar, unsur budaya/pandangan masyarakat perempuan lebih banyak di rumah. Jika terlalu vocal tentang masalah isu-isu kadang perempuan dipandang sedikit kurang baik oleh masyarakat. Dalam ranah politik sebenarnya perempuan harus memiliki peran 30%. Beberapa kali perempuan yang mencalonkan diri, belum terpenuhi. Karena dari masyarakat dan juga majelis sekitar menganggap perempuan tidak bisa dijadikan pemimpin (faktor agama). Namun, pemerintah daerah dan akademisi terus berupaya untuk mendukung politik perempuan yang masih dinilai pasif, karena adanya larangan dari keluarga dan budaya disekitar lingkungan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kata kunci: Pemberdayaan Gender, Peran/Keterlibatan Perempuan, Parlemen (Politik).

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, 'gender' telah digunakan sebagai sinonim untuk jenis kelamin (seks) biologis (misalnya dalam statistik). Penghapusan linguistik ini secara efektif mendepolitisasi, menyelubungi, dan meminggirkan makna asli 'gender', yang mengacu pada konstruksi sosial dan penilaian masyarakat atas peran, harapan, dan pengalaman yang terkait dengan jenis kelamin biologis seseorang. Pentingnya membangkitkan kembali makna asli 'gender' adalah bahwa ia menarik perhatian pada cara-cara di mana ketidaksetaraan antar jenis kelamin didasarkan pada konstruksi sosial dan bukan pada biologi dan dengan demikian terbuka untuk tantangan dan perbaikan¹.

Sekalipun jenis kelamin punya acuan yang sama dengan gender, namun sebenarnya berbeda. Kedua istilah tersebut mengacu pada “ciri-ciri yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin merujuk terutama pada ciri-ciri fisik dan biologis, sedangkan gender merujuk terutama pada ciri-ciri sosial atau budaya”². Gender bersifat performatif, atau sesuatu yang kita “lakukan”³ yang dibangun secara sosial sepanjang hidup melalui penampilan perilaku sehari-hari yang konsisten dengan gender tertentu.

Gender mengacu pada karakteristik perempuan, laki-laki, anak perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial. Ini termasuk norma, perilaku dan peran yang terkait dengan menjadi perempuan, laki-laki, perempuan atau laki-laki, serta hubungan satu sama lain. Sebagai konstruksi sosial, gender bervariasi dari masyarakat ke masyarakat dan dapat berubah dari waktu ke waktu.

Bagi perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya, ketidaksetaraan dan eksklusi, secara keseluruhan, telah meningkat dalam dekade terakhir. Ada kesadaran yang berkembang di antara mereka yang bekerja dalam pengembangan strategi berdasarkan model ekonomi, bagi banyak orang, telah gagal membawa perubahan positif yang sejati. Ini telah mengarah pada pencarian cara baru untuk membangun program dan pendekatan yang melampaui batas ekonomi, dan ke dalam dunia politik, sosial dan budaya. Melihat kewarganegaraan berarti melihat pada orang-orang yang membentuk kelompok, komunitas atau bangsa, dan bagaimana mereka bekerja di dalam kelompok untuk memandu jalan itu berfungsi. Mengambil aktivitas, peran, dan tanggung jawab orang sebagai titik awal membuka hal baru kemungkinan untuk mengatasi, dan memang memperbaiki, marginalisasi kelompok-kelompok seperti perempuan⁴.

Dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dilaksanakan pembangunan gender. Pembangunan tersebut perlu diwujudkan secara bertahap dan berkesinambungan. Upaya itu diwujudkan dalam kebijakan negara maupun dalam kebijakan informal yang dipelopori oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama terkait dengan kendala-kendala yang struktural maupun kultural yang terjadi pada masyarakat. Diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut masing-masing elemen masyarakat dan individu mempunyai sensitifitas gender dan program-program pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan yang responsif gender.

Dalam rangka menanggulangi ketimpangan gender, pemerintah melakukan kegiatan berupa pemberdayaan gender. Keberhasilan pemberdayaan pemberdayaan gender dapat dilacak dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

¹Claire and Holden, 2006

²American Psychological Association, 2015

³West & Zimmerman, 1987

⁴Meer and Sever, 2004

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, skor Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 71,74 pada 2017. Sementara pada 2021, skor IDG naik menjadi 76,26. IDG merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. Tiga indikator yang dipakai dalam IDG, antara lain keterlibatan perempuan di parlemen, partisipasi sebagai tenaga profesional, dan sumbangan dalam pendapatan pekerjaan. Adapun peningkatan IDG terjadi pada seluruh indikator. Keterlibatan perempuan di parlemen tercatat meningkat dari 17,32% pada 2017 menjadi 21,89% pada 2021. Kemudian, partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional meningkat dari 46,31% menjadi 49,99%. Lalu, sumbangan pendapatan perempuan naik dari 36,62% menjadi 37,22 pada tahun lalu⁵. Meskipun keterlibatan perempuan di parlemen meningkat, namun dari perspektif ketimpangan dan pemberdayaan politik masih dikategorikan terburuk. Untuk IDG di Kalimantan Selatan dapat dilihat perkembangannya dari 2021 hingga 2022, pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Perkembangan IDG Kalimantan Selatan 2021-2022

	2021	2022
INDONESIA	75,57	76,26
KALIMANTAN SELATAN	74,48	74,58
1. Banjar	80,52	80,24
2. Banjarmasin	79,60	79,45
3. Barito Kuala	78,03	78,17
4. Hulu Sungai Tengah	77,53	77,48
5. Tabalong	73,39	74,65
6. Tanah Laut	72,80	72,86
7. Kota Baru	72,21	72,60
8. Hulu Sungai Utara	70,65	70,07
9. Balangan	70,14	70,57
10. Tanah Bumbu	67,23	66,87
11. Banjar Baru	66,77	69,70
12. Tapin	64,97	73,19
13. Hulu Sungai Selatan	53,82	53,55

*Sumber: BPS, 2022

Berdasarkan data di atas terdapat empat (4) daerah di Kalimantan Selatan yang memiliki IDG di atas IDG Nasional dan Provinsi, yakni Banjar, Banjarmasin, Barito Kuala, dan Hulu Sungai Tengah. Sementara Tabalong, Tanah Laut, Kota Baru, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tanah Bumbu, Banjarbaru dan Tapin, di bawah IDG Nasional dan Provinsi, bahkan Hulu Sungai Selatan menunjukkan IDG paling rendah.

⁵ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/18/indeks-ketimpangan-gender-indonesia-terburuk-di-bidang-politik>

Dari data di atas dapat dikatakan bahwa tiga dimensi pembedayaan gender di 9 (Sembilan) daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, yakni keterlibatan perempuan di parlemen, partisipasi sebagai tenaga profesional, dan sumbangan dalam pendapatan pekerjaan masih perlu ditingkatkan lagi, terutama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Permasalahan Kewarganegaraan adalah tentang keanggotaan kelompok atau komunitas yang memberikan hak dan tanggung jawab sebagai hasil dari keanggotaan tersebut. Ini adalah status – atau identitas – dan praktik atau proses berhubungan dengan dunia sosial melalui pelaksanaan hak/perlindungan dan pemenuhan kewajiban. Teori Kewarganegaraan berakar pada pemikiran politik barat dan didasarkan pada "warga negara universal" - seorang individu, dengan hak, yang terlibat dengan lembaga pemerintahan atau negara di arena debat politik publik. Namun, bentuk kewarganegaraan berubah sesuai dengan konteks sejarah dan budaya. Orang mendefinisikan kewarganegaraan mereka dalam berbagai cara – dalam kaitannya dengan komunitas lokal, nasional atau global. Hak dan tanggung jawab, ditafsirkan dalam pemikiran barat sebagai merujuk pada individu, dalam masyarakat lain, bisa berdasarkan kebutuhan keluarga atau masyarakat. Salah satu cara penting di mana kewarganegaraan telah dibingkai ulang adalah telah diperkenalkannya perspektif gender oleh para feminis dan aktivis kesetaraan gender. Ini telah menyebabkan pergeseran yang berbeda dalam banyak interpretasi dari kedua status dan praktek kewarganegaraan.

Fokus teoretis tradisional pada hak-hak individu sebagai dasar kewarganegaraan tidak memadai dalam kaitannya dengan isu-isu kesetaraan gender. Hak-hak individu saja merupakan kondisi yang tidak cukup untuk agensi aktif sebagai warga negara, terutama jika diperparah dengan ketidaksetaraan gender yang sistemik. Bentuk lain dari diskriminasi khusus gender telah muncul dalam proses liberalisasi ekonomi dan demokratisasi yang menggantikannya. Gagasan hak memfasilitasi eksplorasi hubungan antara negara, pasar dan rumah tangga serta konsep dan praktik kewarganegaraan, yaitu hak melampaui konsep hak sosial dalam menekankan klaim atas negara dan kemampuan untuk menggunakan hak formal untuk mewujudkan kapasitas individu⁶.

Berdasarkan argumentasi-argumentasi perspektif kesetaraan gender dan kewarganegaraan, khususnya kewarganegaraan gender (gender citizenship), maka menjadi menarik ketika menelaah Indeks Pemberdayaan Gender di Kalimantan Selatan, karena masih terdapat 9 (sembilan) daerah yang berada di bawah Indeks Pemberdayaan Gender baik di tingkat nasional maupun provinsi, khususnya indeks yang paling rendah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

⁶ Einhorn, 2001

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan pedoman wawancara tentang situasi dan latar belakang rendah IDG, bentuk-bentuk pemberdayaan, dan evaluasi program pemberdayaan (pendukung, penghambat, solusi, rencana tindak lanjut), observasi dengan pedoman observasi terhadap suasana pemberdayaan politik, jika saat penelitian berlangsung kegiatan pemberdayaan, dan studi dokumentasi, dengan panduan studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumentasi kegiatan pemberdayaan politik yang dilakukan berupa dokumen tertulis, foto, dan dokumen lainnya.

Penelitian ini menggunakan teknik validitas data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap hal tersebut⁷. Pada dasarnya triangulasi merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multi perspektif. Artinya, guna menarik suatu kesimpulan yang mantap diperlukan berbagai sudut pandang berbeda. Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data mengapa Indeks Pemberdayaan Gender, khusus pemberdayaan politik perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menduduki posisi terendah di Kalimantan Selatan, dimana triangulasi ini mengarahkan penelitian agar didalam mengumpulkan data, ia wajib menggunakan beragam data yang ada.

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan mengapa Indeks Pemberdayaan Gender, khusus pemberdayaan politik perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada masyarakat khusus pemberdayaan politik perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menduduki posisi terendah di Kalimantan Selatan. Penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai Juli 2023. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Miles & Huberman⁸ analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

⁷ Moleong, 2005

HASIL DAN PEMBAHASAN

Visi dan Misi KPU

Visi: "Terwujudkan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, dan terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Misi:

1. Membangun lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu.
2. Menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang bersih efisien dan efektif.
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilu secara adil dan merata, serta menegakkan peraturan pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu dan terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

1. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
3. membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
5. menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
6. mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
7. memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

⁸Miles & Huberman 1992: 16

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf: tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

Tabel 2.

NO	NAMA PARTAI	DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3
1	Partai Kebangkitan Bangsa	(5/11) (45.45%)	(3/8) (37.5%)	(4/11) (36.36%)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	(4/11) (36.36%)	(3/8) (37.5%)	(4/11) (36.36%)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	(5/11) (45.45%)	(3/8) (37.5%)	(4/11) (36.36%)
4	Partai Golongan Karya	(4/11) (36.36%)	(4/8) (50%)	(5/11) (45.45%)
5	Partai NasDem	(4/11) (36.36%)	(2/8) (25%)	(4/11) (36.36%)
6	Partai Buruh	(1/4) (25%)	(1/3) (33.33%)	(1/1) (100%)
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	(3/8) (37.5%)	(3/7) (42.86%)	(2/3) (66.67%)
8	Partai Keadilan Sejahtera	(4/11) (36.36%)	(3/8) (37.5%)	(4/11) (36.36%)
9	Partai Hati Nurani Rakyat	(1/1) (100%)	-	-
10	Partai Garda Republik Indonesia	(0/3) (0%)	(1/2) (50%)	(1/1) (100%)
11	Partai Amanat Nasional	(5/11) (45.45%)	(3/8) (37.5%)	(5/11) (45.45%)
12	Partai Bulan Bintang	-	(1/3) (33.33%)	(1/3) (33.33%)
13	Partai Demokrat	(3/7) (42.86%)	(2/4) (50%)	(6/9) (66.67%)
14	Partai Persatuan Pembangunan	(3/9) (33.33%)	(2/5) (40%)	(3/9) (33.33%)
15	Partai Ummat	(1/3) (33.33%)	-	-
TOTAL JUMLAH				

Credits. KPU Kab HSS.

Tabel 3.



Credits. KPU Kab HSS

Hasil Penelitian

Setelah melaksanakan penelitian pada pemerintah pemberdayaan politik perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, peneliti mendapatkan informan yang merupakan masyarakat asli di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan. Indeks Pemberdayaan Gender, khusus pemberdayaan politik perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menduduki posisi terendah di Kalimantan Selatan.

Pada kesempatan ini peneliti terlebih dahulu mengemukakan indeks pemberdayaan gender, khusus pemberdayaan politik perempuan informan yang dijumpai di Lapangan sebagai berikut. Ibu I.S merupakan Kasubag KPU perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang saat ini sudah mengantongi gelar sarjana (S1) Universitas Lambung Mangkurat, saat ini informan bekerja sebagai Kasubag teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan HUMAS. Menurut informan PKPU 10 tentang keterwakilan perempuan sebelumnya pembulatan kebawah tidak jadi masalah, sekarang harus mencapai 30% yang sebelumnya hanya 25% sekarang harus memenuhi syarat yaitu 30%. Hingga saat ini ada 2 partai yang masih belum memenuhi minimal keterwakilan perempuan dalam mencalonkan anggota legislatif, yaitu: Partai Buruh dan Partai Garuda. Informan menambahkan, pemenuhan keterwakilan perempuan dapat dilaksanakan saat pencermatan DCT (Daftar Calon Tetap) nanti akan ada kesempatan untuk parpol untuk merubah susunan atau menambah calonnya yang perempuan. Perubahan PKPU tentang pencalonan memang belum terbit, namun akan segera terbit dalam waktu dekat. Informan mengatakan peran perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap politik menjadi unsur utama. Karena perempuan lebih punya banyak andil besar dalam politik karna berkebutuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari.

M merupakan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang saat ini sebagai Divisi Sosialisasi informan mengatakan kultur untuk daerah Nagara terutama pendidikan politik perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih dirasa kurang, sehingga menyebabkan kurangnya minat dari masyarakat untuk mencalonkan diri atau memilih perempuan dalam pemilu. Akan tetapi dalam hal partisipasi memilih perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan cukup tinggi, bahkan merupakan suara dominan. Sampai-sampai ada istilah di daerah Nagara “kalaupun ingin menang penentuannya perempuan”. Perempuan merupakan kunci kemenangan. Perempuan yang memiliki kesadaran yang tinggi dalam partisipasi memilih.

W merupakan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang saat ini mempunyai jabatan sebagai Sekretaris Kasubag Keuangan, informan menceritakan bahwasanya di daerah seputaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki kendala dalam minimnya suara untuk perempuan diduga atau dugaan sementara dikarenakan kurangnya tokoh perempuan dalam masyarakat yang berani menyuarakan suara rakyat. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor sosial budaya yang masih

menganggap pemimpin harus seorang laki-laki dan faktor agama. Informan juga menambahkan hal yang sedang dilakukan sebagai upaya perbaikannya yaitu dengan merangkul komunitas mahasiswa dengan harapan akan lahirnya tokoh masyarakat perempuan disana. Informan mengatakan dapat dilihat di KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri pegawai perempuannya termasuk tinggi partisipannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan didapat Indeks Pemberdayaan Gender, khusus pemberdayaan politik perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menduduki posisi terendah di Kalimantan Selatan karena kesadaran untuk mengembangkan masyarakat khususnya kaum perempuan, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara keberlanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, dan meningkatkan tingkat keberlanjutan. Pemberdayaan berarti berpindah dari posisi ketidakberdayaan yang dipaksakan ke posisi kekuasaan. Itu akan mempromosikan kekuatan perempuan yang melekat dan citra diri yang positif harus adanya prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan perempuan.

Informan menyatakan bahwa pemahaman indeks pemberdayaan gender, khusus pemberdayaan politik perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menduduki posisi terendah di Kalimantan Selatan ini dapat terlihat dari hambatan yang terjadi pada masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pelaksanaan politik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dikarenakan masyarakat marginal yang masih kurang memahami tentang pentingnya politik bagi mereka, hal ini terlihat dalam beberapa wawancara yang peneliti lakukan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu N beliau mengatakan bahwa:

“Salah satu kendala dalam pelaksanaan program kerja Dinas PPKBPPPA yaitu adanya penggabungan beberapa Dinas menjadi satu atap. Sehingga, didapatinya beberapa program kerja yang dikesampingkan dan bahkan tidak terlaksana. Dalam hal ini program kerja yang berkaitan dengan kesejahteraan/pemberdayaan perempuan acap kali dikesampingkan.”

Hal yang senada juga dikatakan oleh R, beliau mengatakan bahwa:

“Selain itu untuk SDM/pegawai Dinas PPKBPPPA diakui kekurangan. Karena hanya didapati 1kabid, sukor 1 dan staf PNS ada 1 dan honorer ada 2. APE/ penghargaan terhadap penyeteraan gender dilakukan dalam kurun waktu 2tahun sekali. Rencana akan dilaksanakan pada akhir tahun 2023. PEG di kab HSS dinilai masih kurang.”

Sementara informan lain Bapak Y juga menyatakan bahwa indeks pemberdayaan gender, khusus pemberdayaan politik perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menduduki posisi terendah ini merupakan:

“Kendala yang dialami oleh pemerintah terhadap rendahnya keterwakilan perempuan yaitu karena kurang aktifnya parpol untuk melakukan promosi tentang program kerja yang menyangkut perempuan dan masih kurangnya public figure perempuan di masyarakat, dan adanya sebagian faktor sosial-budaya dan agama serta kurangnya pendidikan politik terhadap perempuan.”

Hal yang senada juga dikatakan oleh KH, beliau mengatakan bahwa:

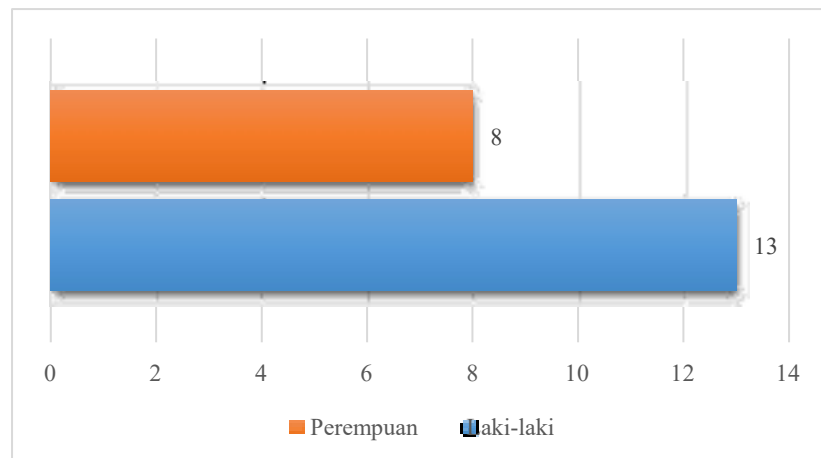
“Keterwakilan perempuan saat ini di DPRD Kabupaten HSS masih belum terpenuhi, dikarenakan hanya ada 2 orang perempuan yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD. Dari total 30 kursi yang telah disediakan oleh KPU.”

Dari pernyataan narasumber di atas bisa kita telaah bahwa indeks pemberdayaan gender, khusus pemberdayaan politik perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menduduki posisi terendah di Kalimantan Selatan karena di daerah pedesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan suara perempuan kurang didengar, unsur budaya/pandangan masyarakat perempuan lebih banyak di rumah. Jika terlalu vocal tentang masalah isu-isu kadang perempuan dipandang sedikit kurang baik oleh masyarakat. Namun dalam ranah politik sebenarnya tidak begitu dibatasi untuk perempuan. Tapi di beberapa kali perempuan yang mencalonkan diri, perempuan tidak terpilih. Karena memang dari masyarakat dan juga majelis-majelis sekitar menganggap perempuan tidak bisa dijadikan pemimpin (faktor agama). Dalam hal berpolitik perempuan dinilai pasif, karena adanya larangan dari keluarga dan budaya disekitar lingkungan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini.

Pembahasan

Pemberdayaan politik perempuan menyiratkan desentralisasi kekuasaan dan otoritas pada orang-orang yang terpinggirkan, tertindas dan tidak berdaya yang belum dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan dan program baik organisasi pemerintah serta masalah keluarga dan masyarakat. Tiwari (2001) menyarankan beberapa langkah untuk pemberdayaan perempuan yang “....terutama memusatkan perhatian untuk menolak semua larangan, kontrol, batasan, nilai, dll., dengan alasan bahwa ini dipaksakan pada wanita hanya oleh patriarki dan merupakan pengungkapan dominasi pria...” Tapi Kumud Sharma (1991-92) dengan tepat menunjukkan bahwa “istilah pemberdayaan mengacu pada rangkaian kegiatan dari individu penegasan diri terhadap perlawanan kolektif, protes dan mobilisasi yang menantang hubungan kekuasaan dasar.”

Distribusi pegawai menurut jenis kelamin, pegawai Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten hulu sungai selatan mayoritas berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 13 orang. hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. Distribusi pegawai menurut jenis kelamin

Toleransi atau sikap tenggang rasa adalah bagian dari konsekuensi logis dari kita hidup bersama sebagai makhluk sosial, karena melanggar konsekuensi ini juga berarti melanggar etika berkehidupan bersama. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Plato, bahwa manusia adalah makhluk sosial yang perlu menghargai satu dan lainnya. Demikian juga halnya dengan perspektif lingkungan, hal yang sama juga berlaku di sini. Pemahaman warganegara akan pentingnya kesadaran ekologis global agar tercipta keseimbangan antara kebutuhan warga dunia dengan kesanggupan bumi dalam menopang kebutuhannya, Capra (1995) menyatakan bahwa:

The great challenge of our time is to build and nurture sustainable communities that are designed in such a way that their ways of life, businesses, economies, physical structures, and technologies do not interfere with nature's inherent ability to sustain life. The first step in this endeavor is to organization that ecosystems have developed to sustain the web of life. This understanding is what we call ecological literacy.

Dari pendapat yang di atas dapat dikemukakan bahwa tantangan besar saat ini adalah setiap perempuan yang terlalu vocal untuk urusan politik tidak dibenarkan oleh aturan agama dan kurangnya minat perempuan di dunia politik, hal ini di pengaruhi faktor kultur budaya. Sedangkan di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri politik tak jarang bersinggungan langsung dengan lingkungan hidup seperti sungai yang tercemar, pembagian bantuan yang tidak merata kadang hal demikian diatur oleh suatu organisasi atau dikuasai oleh laki-laki. Jika terjadi sedikit saja nada

sumbang dari perempuan maka terkadang dari pihak laki-laki memberikan teguran keras yang membuat perempuan merasa takut (kena mental) dalam hal ini menyebabkan terlihat jelas ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Pada Pemilu 2019, pemilihan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibagi kedalam 3 daerah pemilihan sebagai berikut:

Tabel 4. Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2019.

Nama Dapil	Wilayah Dapil	Jumlah Kursi
Hulu Sungai Selatan 1	Sungai Raya, Kandangan, Simpung, Kalumpang	11
Hulu Sungai Selatan 2	Telaga Langsat, Angkinang, Loksado, Padang Batung	8
Hulu Sungai Selatan 3	Daha Selatan, Daha Utara, Daha Barat	11
TOTAL		30

Anggota perempuan di DPRD Kab HSS hanya ada 2 org saja dari 30 anggota yaitu:

1. Yuniati, S.H., M.H., Dari Partai PKB - saat ini jabatan di DPRD HSS adalah Ketua Fraksi PKB dan Ketua Komisi III
2. Risma Fakhryatni, Jabatan saat ini anggota Fraksi Nasdem dan Anggota Bapemperda

Sebagaimana kalangan feminis yang lain menyatakan, “nilai dari kewarganegaraan berada dalam cara ia dinyatakan kembali penting dalam aktivitas politik”⁹. Juga, Ursula Vogel mengaitkan kewarganegaraan dengan keterlibatan dalam aksi-aksi politik, dan sesuai dengan pendapatnya, “dalam kebanyakan pemaknaan umum ‘kewarganegaraan’ mengacu pada status individu sebagai anggota penuh dari komunitas politik tertentu”¹⁰. Kepentingan utama dari kewarganegaraan terletak pada pengakuan dari kuatnya potensi politik yang dimilikinya, yang digunakan dengan tepat dapat menjadi positif terutama bagi kalangan perempuan. Pada dasarnya, melalui kewarganegaraan semua laki-laki dan perempuan berhak terhadap hak untuk partisipasi dan terlibat baik sebagai wakil-wakil maupun pemilih-pemilih untuk wakil-wakil mereka, meskipun, sekarang ini, partisipasi kaum perempuan dalam politik kurang beruntung.

Dalam diskursus hak-hak dan tugas-tugas sebagai bagian dari literature kewarganegaraan, kalangan cendekiawan feminis terutama yang peduli dengan hak-hak dalam istilah dari apa yang kaum perempuan berhak untuk itu (Voet, 1998, 60). Hak-hak kewarganegaraan juga dibagi dalam hak-hak formal dan substansif dari kewarganegaraan, di mana hak-hak formal termasuk hak-hak sipil

⁹Phillips, 1993

¹⁰Vogel and Moran, 1991

dan politik dan hak-hak substansif terdiri dari hak-hak kewarganegaraan sosial dan ekonomi. Namun, sebagaimana Einhorn pertahankan, “batasan-batasan berbasis gender cenderung untuk membuat kesulitan untuk kaum perempuan guna mengimplementasikan hak-hak formal mereka atau untuk menjelmakan hak-hak formal mereka ke dalam hak-hak substansif, terutama dalam paradigma neo-liberal sekarang ini yang menekankan tanggungjawab-tanggungjawab dari pada hak-hak kewarganegaraan (Einhorn, 2001). Selain itu, hak-hak sebagai suatu alat untuk mencapai kewarganegaraan dan sesuai dengan keperempuannya akan menggunakan hak-hak mereka, khususnya dalam wilayah politik, jika mereka ingin mengembangkan kewarganegaraan perempuan untuk apa yang perempuan acu sebagai “kewarganegaraan aktif dan persamaan jenis kelamin”¹¹.

Dalam kerangka teori terhadap gender dan kewarganegaraan, ada tiga model kewarganegaraan yang tumbuh dari upaya kalangan feminis untuk menyusun ulang konsep kewarganegaraan yang mengarah pada dekonstruksi dari relasi-relasi kekuasaan dan menyerang konsep kewarganegaraan sebagai keadaan yang intinya laki-laki. Model pertama, yang dipusatkan pada alokasi dan penggunaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, berkaitan dengan warga negara netral-gender, oleh karena itu membuat gender terhadap warga negara tidak relevan¹². Kunci untuk mewujudkan warga negara netral-gender, meskipun, telah diletakkan dalam ruang publik. Prioritas dari model ini adalah ia mungkin membolehkan kaum perempuan untuk berkompetisi atas istilah-istilah yang sama dengan kaum lelaki dalam ruang publik dan pasar kerja¹³.

Dua tokoh utama dari kewarganegaraan netral-gender kewarganegaraan, Susan Moller Okin dan Anne Phillips, mengakui penting untuk perubahan kewarganegaraan dalam ruang privat, terutama dalam pembagian dalam kerja¹⁴. Okin memimpikan suatu keluarga dan masyarakat “lebih sedikit gender (genderless)”¹⁵. Sementara Phillips fokus pada pembagian kerja domestik sebagai satu yang dapat memberikan konteks di mana “gagasan dari warga negara dapat diawali untuk menganggapnya bermakna penuh, dan orang dapat berpartisipasi secara sama dalam memutuskan tujuan-tujuan umum mereka”¹⁶.

¹¹ Voet, 1998

¹² Voet, 1998

¹³ Hobson dan Lister, 2002

¹⁴ *ibid*, 37

¹⁵ Okin, 1989

¹⁶ Phillips, 1993

KESIMPULAN

Pemahaman Indeks Pemberdayaan Gender, khusus pemberdayaan politik perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menduduki posisi terendah di Kalimantan Selatan secara legalitas terpenuhi tetapi dalam pelaksanaan belum terpenuhi 30% karena seleksi alam dan tantangan besar saat ini adalah setiap perempuan yang terlalu *vocal* untuk urusan politik banyak di pengaruhi faktor kultur budaya masyarakat setempat. Sedangkan di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan sendiri politik tak jarang bersinggungan langsung dan tidak merata kadang hal demikian diatur oleh suatu organisasi atau dikuasai oleh laki-laki.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami ucapkan atas kesempatan dan alokasi dana untuk program pengabdian kepada masyarakat tahun 2023 yang diberikan oleh Rektor Universitas Lambung Mangkurat dan Ketua LPPM Universitas Lambung Mangkurat. Serta terima kasih dan apresiasi kepada KPU Kabupaten HSS, Dinas PPKBPPPA Kabupaten HSS, perwakilan warga Kabupaten HSS dan semua pihak yang telah berperan serta berpartisipasi dalam Program Dosen Wajib Meneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Amdimas, F., Jendrius, J., & Maihasni, M. 2021. Pemberdayaan Perempuan dalam Partai Politik di Provinsi Sumatera Barat (Studi pada Partai Gerindra dan PPP). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 4849–4856. Retrieved from <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1697>
- American Psychological Association. 2015. Guidelines for psychological practice with transgender and gender nonconforming people. *American Psychologist*. Vol. 70, No. 9, 832– 864.
- Bawden R. & Lindsay E. 2007. Patient Empowerment: a general practice perspective. *British Journal of Community Nursing* 12: S28-30.
- Blanchard, K. H., John P. Carlos, & Randolph, A. (1996). *Empowerment takes more than a minute*. San Francisco: Berrett-Koehler.
- Brill, A. (ed.) (2000). *A rising public voice: Women in politics worldwide*. New York, UNIFEM.
- C. Sitorus, P. ., dan P. Astuti. 2015. "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi

- Perempuan Indonesia (KPI) Kota Semarang dalam Pemberdayaan Politik Perempuan di Kota Semarang”. *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 4, no. 3, pp. 151-160, Jun. 2015.
- Çela, Eriada. 2015. Gender dan Model-model Kewarganegaraan: Refleksi-refleksi dari Literatur Feminist. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. Vol 6 No 2 S5 April 2015).
- Claire, Hilary and Holden, Cathie. 2006. *Gender and Citizenship*. CitizED, www.citized.info
- Mandal, Keshab Chandra. 2013. Concept and Types of Women Empowerment. *International Forum of Teaching and Studies*. Vol. 9 No. 2 2013]
- Davis A. Y. 1988. Radical perspective on the empowerment of Afro-American women: lessons for the 1980s *Harvard Educational Review* 58(3): 348-353.
- Einhorn, Barbara. 2001. “Gender and Citizenship in the Context of Democratization and Economic Transformation in East Central Europe” in *Gender in Transition in Eastern and Central Europe: Proceedings* edited by Gabriele Jähnert, Jana Gohrisch, Daphne Hahn, Hildegard Maria Nickel, Iris Peinl, and Katrin Schäffgen, Berlin: Trafo Verlag.
- Elshtain, Jean Bethke. 1981. *Public Man, Private Woman: Women in Social and Political Thought*. Princeton: Princeton Univ. Press.